

## AL-AFKAR: Journal for Islamic Studies

Vol. 6, No. 1, 2023, P-ISSN : 2614-4883; E-ISSN : 2614-4905

Journal website: <https://al-afkar.com>

### Research Article

## Studi Pendidikan: Moderasi Islam Untuk Menangkal Radikalisme di Jawa Barat

Syarif Hidayat<sup>1</sup>, Nurjanah<sup>2</sup>

1. Institut Agama Islam Cipasung
2. Institut Agama Islam Darussalam Ciamis Jawa Barat

Copyright © 2023 by Authors, Published by AL-AFKAR: Journal For Islamic Studies. This is an open access article under the CC BY License (<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0>).

Received : June 27, 2022

Revised : October 12, 2022

Accepted : November 25, 2022

Available online : January 18, 2023

**How to Cite:** Syarif Hidayat and Nurjanah (2023) "Studi Pendidikan: Moderasi Islam Untuk Menangkal Radikalisme di Jawa Barat", *al-Afkar, Journal For Islamic Studies*, 6(1). doi: 10.31943/afkarjournal.v6i1.470.

\*Corresponding Author: Email: [syr.hidayat.sh@gmail.com](mailto:syr.hidayat.sh@gmail.com) (Syarif Hidayat)

### Education Study: Moderation of Islam to Counter Radicalism in West Java

**Abstract.** West Java is one of the regions in Indonesia where the majority of the population is Muslim, so an understanding of democracy based on Islam is needed so that it can be easily accepted. Pluralism in Indonesia, including West Java, will not work well if it does not have a concept that is acceptable to all circles. Because radicalism groups often voice the purification of Islamic teachings by rejecting the democratic system, and end up carrying out acts of terror. The concept is an understanding of Islamic moderation, so that education is able to provide answers to all the needs of a pluralistic society. The method used in this research is critical analytical descriptive with the aim of examining the primary idea of a "scope of the problem" enriched by relevant secondary ideas. The technique of collecting data is through documentation by collecting several documents, both in the form of books, journals, magazines, articles and other scientific works related to the discussion. The data analysis technique was carried out by means of descriptive analysis and content analysis or content analysis. The results of the study stated that religion-based radicalism in West Java grew and developed because it was supported by the situation of society experiencing political pressure, social injustice, and the existence of a deep gap between rich and poor. Islamic moderation is present as a new discourse or paradigm to

understand Islam that upholds the values of tasamuh, pluralism and ukhuwah. Islam rahmatan lil 'lamin which prioritizes the unity and integrity of the people, and Islam which builds civilization and humanity within the framework of Islam Nusantara. Construction, actualization and efforts to moderate Islam in West Java are carried out by religious and religious education institutions, especially Islamic boarding schools by prioritizing the character of *fikrah tawashshutiyyah*, *fikrah tasamuhiyyah*, *fikrah ishlahiyyah*, *fikrah tathawwuriyyah*, and *fikrah manhajiyyah*.

**Keywords:** Education, Islamic Moderation, Radicalism

**Abstrak** Jawa Barat merupakan salah satu wilayah di Indonesia yang mayoritas penduduknya beragama Islam, sehingga diperlukan pemahaman tentang demokrasi berdasarkan Islam agar dapat diterima dengan mudah. Pluralisme di Indonesia termasuk Jawa Barat tidak akan berjalan dengan baik, jika tidak memiliki konsep yang dapat diterima oleh semua kalangan. Karena kelompok radikalisme sering kali menyuarakan pemurnian ajaran Islam dengan menolak sistem demokrasi, dan berujung dengan melakukan aksi teror. Konsep tersebut adalah pemahaman moderasi Islam, sehingga pendidikan mampu memberikan jawaban semua kebutuhan masyarakat yang majemuk. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif analitis kritis dengan tujuan untuk mengkaji gagasan primer mengenai suatu "ruang lingkup permasalahan" yang diperkaya oleh gagasan sekunder yang relevan. Teknik pengumpulan data melalui dokumentasi dengan cara mengumpulkan beberapa dokumen, baik yang berbentuk buku, jurnal, majalah, artikel maupun karya ilmiah lainnya yang berkaitan dengan pembahasan. Teknik analisa data dilakukang dengan cara analisis deskriptif dan content analysis atau analisis isi. Hasil penelitian menyebutkan bahwa Radikalisme berbasis agama di Jawa Barat tumbuh dan berkembang karena didukung oleh situasi masyarakat yang mengalami tekanan politik, ketidakadilan sosial, dan adanya jurang yang dalam antara kaya dan miskin. Moderasi Islam hadir sebagai wacana atau paradigma baru untuk memahami Islam yang menjunjung tinggi nilai-nilai tasamuh, pluralisme dan ukhuwah. Islam rahmatan lil 'lamin yang mengedepankan persatuan dan kesatuan umat, serta Islam yang membangun peradaban dan kemanusiaan dalam bingkai Islam Nusantara. Konstruksi, aktualisasi dan upaya moderasi Islam di Jawa Barat dilakukan oleh lembaga pendidikan agama dan keagamaan terutama Pesantren dengan mengedepankan karakter *fikrah tawashshutiyyah*, *fikrah tasamuhiyyah*, *fikrah ishlahiyyah*, *fikrah tathawwuriyyah*, dan *fikrah manhajiyyah*.

**Kata Kunci:** Pendidikan, Moderasi Islam, Radikalisme

## PENDAHULUAN

Negara Republik Indonesia memiliki keragaman, mulai dari suku, bahasa, budaya dan agama. Perbedaan tersebut terkadang menimbulkan konflik horizontal maupun vertikal, terutama ketika pesta lima tahunan dimulai, yaitu pemilihan umum, baik pemilihan Presiden, pemilihan Legislatif, pemilihan Gubernur atau pemilihan Bupati atau Walikota. Bangsa Indonesia tetap harus waspada karena derasnya informasi yang diterima publik dari media sosial atau media lain, terkadang merusak integrasi bangsa. Dengan demikian, agar tidak merusak jati diri bangsa, diperlukan pengetahuan dan pengenalan makna demokrasi melalui pendidikan.

Jawa Barat merupakan salah satu wilayah di Indonesia yang mayoritas penduduknya beragama Islam, sehingga diperlukan pemahaman tentang demokrasi berdasarkan Islam agar dapat diterima dengan mudah. Pendidikan demokrasi pada hakikatnya membimbing peserta didik untuk lebih dewasa dalam berdemokrasi dengan mensosialisasikan nilai-nilai demokrasi, sehingga perilakunya mencerminkan kehidupan yang demokratis.

Demokrasi pendidikan harus diwujudkan dalam pembelajaran yang

demokratis. Lembaga pendidikan demokratis ditandai dengan keterlibatan pemangku kepentingan dalam semua hal yang berkaitan dengan pengambilan keputusan pendidikan dan harus berpedoman pada nilai-nilai demokrasi.

Pluralisme di Indonesia termasuk Jawa Barat tidak akan berjalan dengan baik, jika tidak memiliki konsep yang dapat diterima oleh semua kalangan. Karena kelompok radikalisme sering kali menyuarakan pemurnian ajaran Islam dengan menolak sistem demokrasi, dan berujung dengan melakukan aksi teror (Jauhar Fuad, 2015). Konsep tersebut adalah pemahaman moderasi Islam, sehingga pendidikan mampu memberikan jawaban semua kebutuhan masyarakat yang majemuk.

Pendidikan memiliki peran dalam mentransformasikan ideologi bangsa dan ideologi agama. Ideologi lembaga pendidikan menjadi hal yang penting dalam menentukan tujuan pendidikan, karena lembaga pendidikan dapat menentukan kebijakan pendidikan, tujuan pendidikan dan kurikulum. Pilihan ideologi yang salah dapat berdampak pada kelangsungan hidup bangsa, negara, dan agama.

Islam sebagai agama harus hadir dengan menawarkan ideologi keagamaan yang moderat, sehingga moderasi agama hadir untuk mengatasi persoalan radikalisme (A Jauhar Fuad & Susilo, 2019). Dengan demikian, moderasi Islam perlu diposisikan sebagai mainstream pendidikan Islam di Indonesia dan dikembangkan menjadi model pendidikan moderasi Islam dunia.

Kementerian Agama Republik Indonesia menjadikan moderasi Islam dengan konsep Islam *rahmatan lil Alamin* sebagai alur utama pendidikan Islam, baik di tingkat dasar, menengah, dan tinggi (Jauhar Fuad, 2020). Dengan demikian, pendidikan moderasi Islam dijadikan sebagai cara pandang lembaga pendidikan dan ideologi sebagai alat pemersatu dalam kemajemukan, sehingga keberadaannya mutlak di negara multikultural.

Istilah moderasi diambil dari bahasa Arab, yaitu *al-washatiyyah* yang berarti tengah atau moderat. Moderasi dalam Islam sering diistilahkan dengan *tawassuth*. Selain kata *tawassuth*, menurut KH. Afifuddin Muhajir terdapat kata *ta'adul* dan *tawāzun* yang memiliki arti sangat berdekatan, atau bahkan sama dengan *tawassuth*. Bahkan Mudir Ma'had Aly Situbondo mengatakan bahwa tiga ungkapan tersebut bisa disatukan menjadi *wasathiyah* (Sukriy, 2004). Dalam Al-Qur'an terdapat ayat yang menjelaskan *wasathiyah*, yaitu surat Al-Baqarah ayat 143: "Dan demikian (pula) Kami telah menjadikan kamu (umat Islam), umat yang adil dan pilihan agar kamu menjadi saksi atas (perbuatan) manusia dan agar Rasul (Muhammad) menjadi saksi atas (perbuatan) kamu. dan Kami tidak menetapkan kiblat yang menjadi kiblatmu (sekarang) melainkan agar Kami mengetahui (supaya nyata) siapa yang mengikuti Rasul dan siapa yang membelot. dan sungguh (pemindahan kiblat) itu terasa Amat berat, kecuali bagi orang-orang yang telah diberi petunjuk oleh Allah; dan Allah tidak akan menyia-nyiakan imanmu. Sesungguhnya Allah Maha Pengasih lagi Maha Penyayang kepada manusia" (QS. Al-Baqarah [2]:143).

Quraish Shihab menjelaskan bahwa kata *wasathan* yang terdapat dalam Surah al-Baqarah ayat 143 menunjukkan posisi tengah, artinya umat Islam harus berperilaku adil, yang tidak ekstrim dalam beragama dan tidak liberal dalam memahami dan mengamalkannya serta membuat seseorang dapat melihat dari segala arah. Ketika itu terjadi, dia berpotensi menjadi panutan bagi semua pihak.

Kata '*al-wasathiyyah*' berakar pada kata *al-wasath* (dengan huruf sin yang di-sukun-kan) dan *al-wasath* (dengan huruf sin yang di-fathah-kan), keduanya merupakan *mashdar (infinitive)* dari kata kerja (*verb*) *wasatha*. Secara sederhana, istilah *wasathiyyah* berangkat dari makna etimologis di atas, yang berarti sifat terpuji yang menjaga seseorang agar tidak cenderung ekstrem. Kata *al-wasath* merupakan pola *zharf* yang artinya *baina* (di antara). Sementara itu, kata *al-wasathu* mengandung empat makna, yaitu: Pertama, kata benda (*ism*) yang berarti kedudukan antara dua kedudukan yang berlawanan. Kedua, sebagai kata sifat yang berarti pilihan (*khiyar*), utama (*afdhali*), dan terbaik (*ajwad*). Ketiga, artinya '*adl*' (adil). Keempat, berarti sesuatu yang berada di antara yang baik dan yang buruk/netral (*asy-syay'u baina al-jayyid wa ar-rad'i*). Sedangkan jika kedua kata tersebut diturunkan, maka maknanya akan berkisar pada makna adil, utama, pilihan terbaik, dan seimbang antara dua posisi yang berlawanan. Diantaranya, kata *wasith* yang artinya hasib dan sharif, seperti perkataan Jauhari: "*fulân wasîth fî qaumihî idzâ kâna ausathuhum nasaban wa arfa'uhum mahallan.*" Dan kata *al-wasath* yang artinya *al-mutawassith baina al-mutakhassimaini* (perantara antara dua orang yang berselisih). Begitu juga dengan derivasi lainnya, seperti: *at-tawassuth*, *at-tausith*, dan *wasithah* (Zamimah, 2018: 80-81).

Muhammad al-Shalabi dalam Magfuroh (2015) menjelaskan pengertian dasar *wasathiyyah* yang terdapat dalam kamus-kamus bahasa Arab, bahwa konsep *wasathiyyah* secara etimologi memiliki dua pengertian pokok, yaitu: *Pertama*, sebagai kata benda (*ism*) dengan pola *zharf* yang lebih bersifat kongkrit (*hissi*), yaitu sebagai perantara atau penghubung (*interface/al-bainiyyah*) antara dua hal atau dua kondisi atau antara dua sisi berseberangan. *Kedua*, lebih bersifat abstrak (*theoretical*) yang berarti terbaik, adil, pilihan, dan utama (*superiority/al-khiyar*).

Raghib al-Ashfahani (1992:513) mendefinisikan *wasathiyyah* sebagai titik tengah, seimbang tidak terlalu kanan (*ifrath*) dan tidak terlalu kiri (*tafrith*), yang di dalamnya mengandung makna keadilan (*al-'adl*), kehormatan, dan persamaan (*al-musawah*). Dalam buku Strategi *al-wasathiyyah* yang dikeluarkan oleh Kementerian Wakaf dan Agama Islam Kuwait dan dikutip oleh Mukhlis Hanafi (2009:40), *wasathiyyah* diartikan sebagai metode berpikir, berinteraksi, dan berperilaku berdasarkan sikap *tawazun* (seimbang) dalam menanggapi dua situasi perilaku yang memungkinkan untuk dianalisis dan dibandingkan, sehingga dapat ditemukan sikap yang sesuai dengan kondisi dan tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip ajaran agama dan tradisi masyarakat.

Indonesia sebagai negara yang memiliki penduduk muslim terbesar di dunia adalah sorotan penting dalam hal moderasi Islam. Moderasi merupakan inti ajaran Islam. Islam moderat adalah pemahaman agama yang sangat relevan dalam konteks keragaman dalam segala aspek, baik agama, adat istiadat, suku, dan bangsa itu sendiri (Dawing, 2017:231). Oleh karena itu, moderasi Islam harus dipahami secara kontekstual bukan secara tekstual. Artinya, moderasi Islam di Indonesia bukan Islam yang dimoderasi, tetapi bagaimana cara memahami agama secara moderat, karena Indonesia memiliki banyak budaya, ras dan adat istiadat. Dengan demikian, moderasi Islam ini harus mampu menjawab berbagai masalah dalam agama dan peradaban global.

Islam dan Muslim saat ini setidaknya menghadapi dua tantangan; *Pertama*, kecenderungan sebagian kaum muslimin untuk berperilaku ekstrim dan ketat dalam memahami teks agama dan mencoba memaksakannya, bahkan di beberapa hal menggunakan kekerasan; *Kedua*, kaum muslimin ekstrim, akan tetapi longgar dalam agama, bahkan tunduk pada pikiran dan perilaku negatif yang berasal dari budaya dan peradaban lain. Mereka mengutip teks-teks agama (Al-Qur'an dan Hadits) dan karya-karya ulama klasik (*turats*) sebagai dasar dan kerangka pemikiran, tetapi cara memahaminya secara tekstual dan terlepas dari konteks kesejarahan, sehingga mereka seperti generasi yang terlambat lahir, sebab hidup di tengah masyarakat modern, akan tetapi cara berfikir menggunakan pemikiran generasi terdahulu (Fahri & Zainuri, 2019).

Keanekaragaman (pluralitas) merupakan kebutuhan dalam hidup dan sebagai *sunnatullah* yang dapat dilihat di dunia ini. Allah SWT menciptakan dunia ini berdasarkan sunnah heterogenitas. Dalam kerangka kesatuan suatu bangsa, Allah SWT menciptakan keragaman budaya, suku, dan golongan. Dalam kerangka kesatuan bahasa, Allah SWT menciptakan berbagai dialek. Oleh karena itu, dalam menghadapi masyarakat yang pluralistik, senjata paling ampuh untuk mengatur ketertiban dan kedamaian serta tidak ada radikalisme, maka pendidikan Islam yang moderat menjadi salah satu solusinya (Fahri & Zainuri, 2019).

Kementerian Agama Republik Indonesia dalam Fuad (2020) telah merumuskan empat indikator tentang moderasi beragama di Indonesia, yaitu:

1. Komitmen Nasional

Sikap komitmen kebangsaan merupakan indikator penting untuk melihat implikasi pola pikir, sikap, dan praktik keagamaan seseorang terhadap kesetiannya pada konsensus dasar kebangsaan Indonesia. Sikap komitmen kebangsaan diharapkan dapat menjadikan individu yang memiliki karakter moderat dalam pengejawantahan ajaran agamanya dalam konteks norma-norma kehidupan sosial masyarakat Indonesia yang berlaku. Oleh karena itu, mengamalkan ajaran agama sama dengan menjalankan kewajiban sebagai warga negara, karena menunaikan kewajiban sebagai warga negara merupakan perwujudan dari mengamalkan ajaran agama.

2. Toleransi

Toleransi menekankan pentingnya sebuah paradigma serta sikap terbuka dalam menghargai perbedaan serta menerima perbedaan sebagai fakta alam. Oleh karena itu, toleransi menjadi landasan yang sangat urgen dalam mewujudkan tatanan masyarakat demokratis seperti di Indonesia, karena sistem demokrasi hanya dapat terwujud apabila individu-individu dalam suatu masyarakat dapat saling bertoleransi. Semakin tinggi semangat toleransi suatu bangsa terhadap keragaman kehidupan yang ada, maka bangsa tersebut cenderung semakin demokratis, begitu pula sebaliknya. Dengan demikian, toleransi sebenarnya tidak hanya terkait dengan keyakinan agama, tetapi erat kaitannya dengan perbedaan ras, jenis kelamin, perbedaan orientasi seksual, suku, budaya, dan sebagainya. Indikator toleransi dalam kehidupan moderasi beragama di Indonesia lebih menekankan pada intensitas toleransi antar umat beragama maupun toleransi antar agama, baik yang berkaitan dengan aspek kehidupan sosial maupun aspek politik. Penanaman nilai toleransi dapat diwujudkan

dalam pembentukan pola pikir dan sikap sosial yang dilandasi semangat toleransi beragama. Melalui sikap toleransi antar umat beragama yang berbeda agama, diharapkan akan terjadi sikap saling berdialog, kerja sama antar umat beragama dalam konteks kehidupan bermasyarakat.

### 3. Anti kekerasan (radikalisme)

Radikalisme dalam ranah moderasi beragama dipahami sebagai paham yang bertujuan untuk menggantikan sistem sosial dan politik di Indonesia melalui berbagai bentuk kekerasan yang bersembunyi di balik nama agama, baik verbal, fisik, maupun kekerasan spiritual. Secara umum paham dan gerakan radikalisme ini menginginkan perubahan yang signifikan tanpa waktu yang lama, meskipun harus bertentangan dengan sistem sosial yang sudah berlaku di suatu negara (wilayah) atau kelompok. Perasaan ini tidak serta merta memunculkan radikalisme, tetapi merupakan sebuah proses, yaitu ketika dikelola secara ideologis dengan membangkitkan kebencian terhadap kelompok yang dianggap pembuat ketidakadilan dan mereka yang mengancam identitasnya. Ketidakadilan dan perasaan terancam bisa muncul bersamaan, tetapi juga bisa dipisahkan. Berdasarkan penjelasan di atas, tidak mengherankan jika dalam istilah praktis, radikalisme sering diidentikkan dengan terorisme. Sebab, kelompok radikal bisa mengambil berbagai bentuk dan cara untuk mewujudkan keinginannya, meski harus menyorot pihak lain yang tidak sejalan dengannya. Selain itu, radikalisme tidak hanya dapat terjadi pada individu atau kelompok kepercayaan tertentu, tetapi juga dapat terjadi pada semua agama.

### 4. Akomodatif Terhadap Budaya Lokal

Sikap akomodatif terhadap budaya lokal dapat menjadi landasan nilai bagi pembentukan karakter individu dalam menerima berbagai praktik keagamaan yang identik dengan budaya (tradisi) lokal di Indonesia. Dalam konteks ini, sikap akomodatif terhadap adat istiadat setempat diharapkan dapat membentuk pola pikir dan sikap moderasi beragama individu yang ramah dalam menyikapi kebiasaan-kebiasaan lokal dalam berperilaku beragama, sepanjang tidak bertentangan dengan ajaran pokok keyakinan tertentu. Namun, dalam ranah empiris, praktik keagamaan tidak serta merta menggambarkan moderasi. pelakunya. Ini hanya dapat digunakan untuk sekadar melihat tren umum. Pandangan bahwa seseorang yang lebih akomodatif terhadap tradisi lokal, akan lebih moderat dalam beragama belum terbukti.

## METODE

Metode merupakan prosedur atau cara yang ditempuh untuk mencapai tujuan tertentu. Metode yang digunakan merujuk pada metode yang dikembangkan oleh Jujun Suria Sumantri (1998), yaitu *deskriptif analitis kritis*. Metode ini bertujuan untuk mengkaji gagasan primer mengenai suatu “ruang lingkup permasalahan” yang diperkaya oleh gagasan sekunder yang relevan. Adapun fokus penelitian analitis kritis adalah mendeskripsikan, membahas dan mengkritik gagasan primer yang selanjutnya “dikonfrontasikan” dengan gagasan primer yang lain dalam upaya melakukan studi berupa perbandingan, hubungan dan pengembangan model (Sumantri, 1998:44).

Penelitian ini menggunakan pendekatan studi pustaka (*library research*). Studi pustaka lebih menekankan pada kekuatan analisis data pada sumber-sumber data diperoleh dari berbagai buku-buku dan tulisan-tulisan lain dengan mengandalkan teori yang ada untuk diinterpretasikan secara jelas dan mendalam (Abdurrahman, 1999:25).

Sumber data berasal dari buku-buku, jurnal, dan karya ilmiah lain yang relevan dengan pembahasan sebagai komponen dasar. Dalam penelitian karya ilmiah ini, peneliti menggunakan *personal document* sebagai sumber data primer, dalam hal ini adalah buku-buku yang berkaitan dengan pendidikan pesantren dan kecerdasan majemuk serta sumber-sumber lain yang erat kaitannya dengan pembahasan.

Berdasarkan pendekatan yang digunakan bersifat kepustakaan, maka pengumpulan data menggunakan teknik dokumentasi dengan mengumpulkan dari beberapa dokumen, baik yang berbentuk buku, jurnal, majalah, artikel maupun karya ilmiah lainnya yang berkaitan dengan pembahasan. Setelah data terkumpul, data tersebut dianalisis untuk mendapatkan konklusi, bentuk-bentuk dalam teknik analisis data sebagai berikut:

1. Analisis deskriptif, yaitu usaha untuk mengumpulkan dan menyusun suatu data, kemudian dilakukan analisis terhadap data tersebut (Surakhmad, 1990:139). Pendapat tersebut di atas diperkuat oleh Lexy J. Moloeng (2002:6), Analisis data deskriptif merupakan data yang dikumpulkan berupa kata-kata dan gambar bukan dalam bentuk angka-angka.
2. *Content Analysis* atau Analisis Isi merupakan metodologi yang memanfaatkan seperangkat prosedur untuk menarik kesimpulan yang dari sebuah dokumen. Noeng Muhajir (2002:69) mengatakan bahwa *content analysis* harus meliputi objektif, sistematis, dan general.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

Permasalahan umat Islam semakin kompleks, tidak hanya menyangkut aspek teologis, tetapi telah merambah ke berbagai aspek kehidupan, salah satunya aspek politik. Moderasi Islam hadir sebagai wacana atau paradigma baru untuk memahami Islam yang menjunjung tinggi nilai-nilai *tasamuh*, pluralisme dan *ukhuwah*. Islam yang mengedepankan persatuan dan kesatuan umat, serta Islam yang membangun peradaban dan kemanusiaan. Dengan semakin maju dan berkembangnya keilmuan Islam, maka konflik-konflik yang dapat menghancurkan Islam dan membuat

kemerosotan Islam akan dapat dihindari. Hal ini menunjukkan bahwa umat Islam semakin maju dan berkembang, baik dari segi ilmu pengetahuan maupun akhlak atau etika.

## Hasil

Provinsi Jawa Barat secara geografis terletak di antara 5°50' - 7°50' Lintang Selatan dan 104°48' - 108°48' Bujur Timur, dengan batas-batas wilayah: Sebelah Utara, dengan Laut Jawa dan DKI Jakarta; Sebelah Timur, dengan Provinsi Jawa Tengah; Sebelah Selatan, dengan Samudra Indonesia; Sebelah Barat, dengan Provinsi Banten. Provinsi Jawa Barat memiliki kondisi alam dengan struktur geologi yang kompleks dengan wilayah pegunungan berada di bagian tengah dan selatan serta dataran rendah di wilayah utara. Memiliki kawasan hutan dengan fungsi hutan konservasi, hutan lindung dan hutan produksi yang proporsinya mencapai 22,10% dari luas Jawa Barat; curah hujan berkisar antara 2000-4000 mm/th dengan tingkat intensitas hujan tinggi; memiliki 40 Daerah Aliran Sungai (DAS) dengan debit air permukaan 81 milyar m<sup>3</sup>/tahun dan air tanah 150 juta m<sup>3</sup>/th.

Secara administratif pemerintahan, wilayah Jawa Barat terbagi kedalam 27 kabupaten/kota, meliputi 18 kabupaten, yaitu Kabupaten Bogor, Kab. Sukabumi, Kab. Cianjur, Kab. Bandung, Kab. Garut, Kab. Tasikmalaya, Kab. Ciamis, Kab. Pangandaran, Kab. Kuningan, Kab. Cirebon, Kab. Majalengka, Kab. Sumedang, Kab. Indramayu, Kab. Subang, Kab. Purwakarta, Kab. Karawang, Kab. Bekasi, Kab. Bandung Barat dan 9 kota, yaitu Kota Bogor, Kota Sukabumi, Kota Bandung, Kota Cirebon, Kota Bekasi, Kota Depok, Kota Cimahi, Kota Tasikmalaya, dan Kota Banjar serta terdiri dari 626 kecamatan, 641 kelurahan, dan 5.321 desa.

Gambar 1. Peta Provinsi Jawa Barat

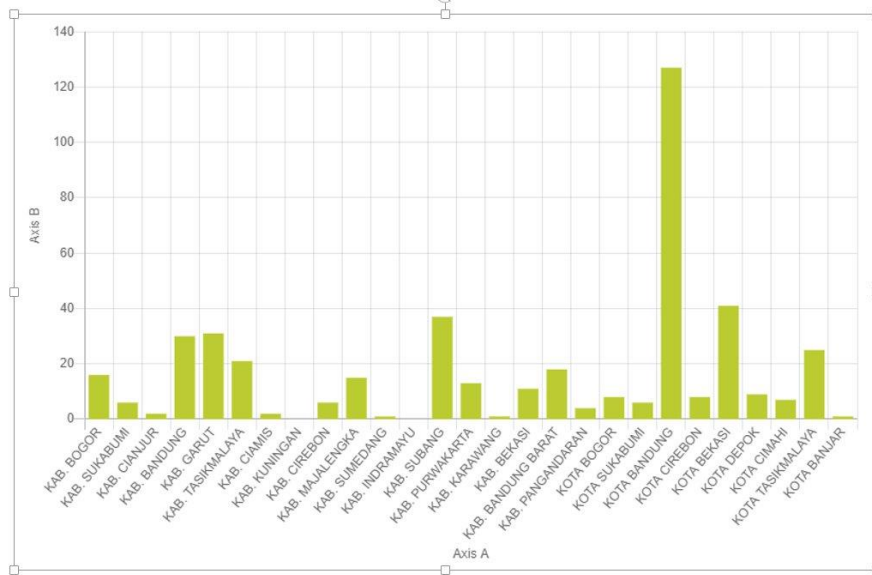


Di Jawa Barat, kekerasan berbasis agama sering terjadi dengan tujuan pemaksaan kehendak, koersi, dan publikasi politik yang memakan korban masyarakat sipil yang tidak berdosa. Berdasarkan data yang diperoleh dari dataset Kesbangpol Provinsi Jawa Barat tahun 2021 menunjukkan bahwa selama tahun 2020 potensi konflik



sangat tinggi, terutama di Kota Bandung.

Gambar 2 Jumlah Potensi Konflik Provinsi Jawa Barat



(<https://opendata.jabarprov.go.id/id/dataset/jumlah-potensi-konflik-berdasarkan-kabupatenkota-di-jawa-barat>), Diakses pada 25 Januari 2022.

Aksi teror dan kekerasan pun seringkali terjadi dilakukan oleh kelompok-kelompok yang merasa dirugikan secara politik. Jika arus komunikasi politik tersumbat, dalam arti media massa maupun sistem perwakilan rakyat tidak efektif dan tidak mampu memenuhi aspirasi rakyat, saat itulah radikalisme muncul. Terorisme sama dengan perang, yaitu politik melalui cara lain. Alasannya karena terorisme bersumber dari rasa ketidakpuasan dan frustrasi politik (Djelantik, 1999:189).

Aksi teror dan kekerasan kerap dilakukan oleh kelompok yang merasa dirugikan secara politik. Jika arus komunikasi politik terhambat, dalam arti media massa dan sistem perwakilan rakyat tidak efektif dan tidak mampu memenuhi aspirasi rakyat, saat itulah radikalisme (terorisme) muncul. Terorisme bermula dari rasa ketidakpuasan dan frustrasi politik (Djelantik, 1999: 189).

Radikalisme berbasis agama tumbuh dan berkembang karena didukung oleh situasi masyarakat yang mengalami tekanan politik, ketidakadilan sosial, dan adanya jurang yang dalam antara kaya dan miskin. Radikalisme diyakini sebagai bentuk strategi politik kelompok lemah menghadapi pemerintahan yang kuat dan berkuasa. Pelaku utamanya biasanya adalah organisasi politik radikal yang melakukan aksi-aksi revolusioner. Radikalisme berbasis agama dilakukan oleh kelompok yang telah mencapai keputusan kolektif berdasarkan keyakinan bersama, meskipun komitmen setiap orang terhadap kelompok dan keyakinannya tidak sama. Radikalisme yang berorientasi politik melakukan tindakan politik secara individual atas nama masyarakat dan secara kolektif berusaha untuk membenarkan tindakannya (Reich, 1990).

Dibandingkan dengan provinsi lain di Indonesia, Jawa Barat merupakan daerah yang banyak terjadi terorisme dan kekerasan berbasis agama. Jawa Barat akan

dijadikan sampel dan studi kasus terkait dengan isu pembangunan politik dan ekonomi seperti: angka putus sekolah, tingkat pengangguran, ketersediaan lapangan kerja, pendapatan per kapita, indeks pembangunan manusia, dll. Selanjutnya, faktor agama dan pemahaman ajaran Islam yang telah disalahartikan oleh sebagian orang yang telah berubah menjadi kelompok radikal.

### **Konstruksi Meoderasi Islam di Jawa Barat**

Agama diyakini pemeluknya sebagai sumber nilai yang berisi aturan-aturan normatif yang menjadi standar perilaku bagi pemeluknya. Simbol-simbol, mitos, keyakinan teologis, dan ideologi agama merupakan sumber kebudayaan yang berpengaruh kuat terhadap pola interaksi antar kelompok masyarakat. Kuatnya keyakinan dalam membentuk kepribadian, cara pandang, ideologi (*worldview*) manusia yang merefleksi dalam bentuk sikap dan perilaku dalam banyak hal dapat melebihi kekuatan pengaruh kebudayaan lainnya. Atas dasar keyakinan atau agama, seseorang siap melakukan bunuh diri, membunuh, dan ikut berperang. Slogan 'jihad' cukup efektif untuk menggerakkan seorang pemeluk Islam untuk berperang melawan kekafiran atau melakukan pengorbanan secara sungguh-sungguh demi tegaknya agama Islam.

Agama juga mengatur model hubungan antar manusia berdasarkan landasan wahyu sehingga tercipta batas-batas hubungan sosial antar kelompok agama yang berbeda. Dalam pola hubungan tersebut ada batas-batas yang jelas didasarkan kepada teks al-Qur'an dan Hadits-hadits Nabi mengenai etika hubungan antar umat berbeda agama. Tata aturan tentang hubungan antar umat Islam dengan non-Muslim sering disalahfahami sebagai eksklusivitas dan sering tidak dapat diterima bahkan orang Muslim sekalipun. Prasangka dan stereotip tersebut sering mengganggu komunikasi dan interaksi antar kelompok berbeda latar budaya yang disebabkan oleh perbedaan paradigma atau cara pandang (*worldview*) yang dimiliki mereka (Parekh, 2001:411).

Dari perbedaan cara pandang tersebut muncullah kelompok-kelompok secara dikotomis. Dari penyikapan dikotomis ini muncullah istilah-istilah skismik Islam inklusif-Islam eksklusif, Islam tradisional-Islam modernis, Islam fundamentalis-Islam liberal, dan sebagainya. Pelabelan skismik seperti ini tidak pernah dapat menyelesaikan masalah, bahkan sebaliknya telah menciptakan fragmentasi di kalangan umat Islam yang mengarah kepada konflik. Ironisnya pelabelan seperti itu sering dilakukan oleh pihak-pihak yang menghendaki terciptanya suasana damai di kalangan umat beragam agama atau masyarakat multiagama, seperti para penggagas dan pendukung multikulturalisme.

Ketika agama dan pemeluk agama sudah dikelompokkan sedemikian rupa melalui label-label yang diterapkan kepada mereka, hal itu dengan sendirinya akan mempertajam ingroup-outgroup kelompok satu agama. Setelah itu, kemudian tercipta jarak yang makin lebar dan batas-batas interaksi yang semakin tegas yang dibangun berdasarkan ciri-ciri eksklusif masing-masing. Dengan demikian, pihak-pihak yang memberi label terhadap umat beragama dengan label-label dikotomik seperti dikemukakan di atas turut andil memperburuk suasana hubungan antar umat beragama di Indonesia, khususnya Jawa Barat.

Studi-studi mengenai kelompok minoritas vs mayoritas di Jawa Barat

khususnya, sering bermuara pada tuduhan terhadap kelompok mayoritas yang secara kuantitatif dianggap memperlakukan kelompok minoritas secara diskriminatif (*blaming the majority*). Gambaran dan opini yang sering muncul adalah bahwa kelompok minoritas merasa terancam eksistensinya karena memperoleh perlakuan diskriminatif dari kelompok mayoritas. Akibatnya, opini menjadi tidak seimbang antara hak minoritas dan hak mayoritas di mana perhatian lebih sering tertuju kepada hak-hak minoritas yang harus dilindungi. Padahal, mayoritas dan minoritas di suatu wilayah atau lingkungan masyarakat merupakan suatu realitas yang tidak dapat dipersalahkan. Oleh karena itu, studi multikulturalisme seharusnya bukan hanya menyangkut hak-hak minoritas dan kelompok tertindas, tetapi juga hak-hak kelompok mayoritas dan kelompok dominan. Studi multikulturalisme bukan studi tentang orang lain (*others*), tetapi studi tentang keragaman kebudayaan untuk semua orang. Untuk kasus Jawa Barat khususnya, isu mayoritas-minoritas yang paling menonjol adalah kasus ras (Cina) dan agama, yakni Islam versus penganut agama non-Islam di wilayah mayoritas Muslim.

### **Aktualisasi Moderasi Islam di Jawa Barat**

Di Jawa Barat konflik yang terjadi antar umat beragama disebabkan oleh agama atau kepercayaan antar kelompok yang bertikai sering terjadi penyangkalan. Alasan yang sering dikemukakan adalah bahwa agama hanya mengandung unsur kebaikan universal, tidak mungkin mengundang konflik. Penyangkalan seperti ini sebenarnya merupakan penyangkalan terhadap adanya konsep kebenaran yang berbeda dalam setiap agama. Dan, penyangkalan seperti ini pada gilirannya hanya akan mengabaikan unsur-unsur penting dan mendasar dalam upaya menciptakan harmoni sosial di tengah masyarakat Jawa Barat yang majemuk. Oleh karena itu, jika masih ada ketidaksiapan secara jujur dan terbuka untuk bersama-sama membicarakan masalah fundamental masing-masing agama, maka upaya untuk menciptakan kerukunan sosial antar umat beragama di Jawa Barat tidak akan sepenuhnya berhasil dan tidak akan mencegah konflik antar umat beragama dan internal umat beragama disebabkan pandangan dan ide yang berbeda.

Setiap kali ada peluang konflik, apalagi jika dibarengi dengan terjadinya krisis sosial, konflik akan muncul ke permukaan sehingga menimbulkan krisis multidimensi. Tampaknya ada juga keraguan di semua pihak untuk berani berbicara tentang perbedaan dalam masalah aqidah (teologis), ideologi, doktrin, dan sebagainya yang mendasar dalam setiap agama. Padahal, membahas masalah teologi, ibadah, kemasyarakatan, dan aspek agama lainnya sebenarnya bisa membawa semua pihak pada pemahaman dan tidak saling menghakimi. Kerukunan sosial dapat terwujud apabila setiap orang dapat saling mengenal dan memahami kedudukan dan kewajiban masing-masing pihak.

Di sisi lain, yang terus terjadi adalah tuduhan bahwa agama atau paham orang lain adalah biang keladi dari permasalahan yang terjadi. Selain itu, upaya dialog hanya dilakukan di tingkat elit, padahal konflik terbuka terjadi di tingkat akar rumput. Apalagi dialog antara umat beragama dan pemerintah tidak dirumuskan sedemikian rupa dalam kedudukan yang setara, yang terjadi pemerintah lebih dominan, menganggap dirinya lebih peka terhadap masalah, dan tidak mendengarkan suara

arus bawah, melainkan lebih sering “mengatur”. Dialog dengan cara ini menjadi tidak seimbang dan tidak menghasilkan ide-ide baru.

### Upaya Moderasi Islam di Jawa Barat

Pemerintah Provinsi Jawa Barat dalam rangka moderasi Islam menempuh dua cara, yaitu penyelesaian jangka pendek dan penyelesaian jangka panjang. Dalam jangka pendek, Pemerintah Provinsi Jawa Barat bekerjasama dengan BNPT (untuk terorisme) dan polisi, dan dialog antar kelompok yang bertikai. Sayangnya cara menghadapinya masih standar dan kurang kreatif, sehingga begitu aparat keamanan kembali ke markasnya, insiden itu terjadi lagi. Jika terus dipantau akan menjadi mahal dan tidak efisien. Sedangkan dialog yang dilakukan pemerintah hanya melibatkan elit agama atau tokoh masyarakat. Padahal, mereka yang terlibat dalam konflik dan menjadi korban adalah masyarakat bawah.

### Pembahasan

Moderasi beragama tidak bisa dilepaskan dari istilah toleransi. Moderasi beragama adalah sebuah proses, dan toleransi adalah hasil atau *outcome* jika moderasi diterapkan. Kata toleransi dapat diartikan sebagai keluasan pikiran, dalam arti menyukai siapa saja, membiarkan orang lain mengemukakan pendapat, tidak ingin mengganggu kebebasan berpikir dan berkeyakinan orang lain. Toleransi dalam konteks ini dapat dirumuskan sebagai sikap keterbukaan untuk mendengar pandangan yang berbeda. Toleransi berfungsi dalam dua arah, yaitu mengekspresikan pandangan dan menerima pandangan dalam batas-batas tertentu, namun tidak saling menghancurkan keyakinan agama.

Hakikat toleransi terhadap pemeluk agama lain merupakan prasyarat utama bagi terwujudnya kerukunan bangsa. Sementara itu, kerukunan bangsa merupakan pilar bagi terwujudnya pembangunan nasional. Secara substantif melalui toleransi dan saling menghormati antar pemeluk agama, akan terjadi interaksi dan pemahaman yang baik antar umat beragama, sehingga dapat terwujud kehidupan yang aman, tentram dan harmonis.

Toleransi merupakan salah satu indikator terpenting terciptanya kerukunan umat beragama, yaitu kondisi kehidupan umat beragama yang rukun, toleran, damai, saling menghormati, dan menghargai perbedaan agama dan kebebasan beribadah. Di Jawa Barat, telah terjadi berbagai konflik kekerasan sosial keagamaan yang mengakibatkan kerugian yang tidak ternilai, baik harta benda maupun jiwa. Banyak rumah ibadah, bahkan fasilitas sosial yang rusak, terbakar atau hancur, sehingga banyak memakan korban jiwa. Peristiwa kekerasan ini sering terjadi dan diberitakan secara luas di berbagai media, baik cetak maupun elektronik. Para pelaku yang terlibat dalam peristiwa tersebut, seolah-olah belum menyadari bahwa keberagaman atau kebhinekaan adalah anugerah Tuhan yang harus disyukuri, sehingga perlu dikelola dengan baik. Kejadian ini tidak menggambarkan kehidupan masyarakat Jawa Barat secara keseluruhan, karena secara historis masyarakat Jawa Barat yang pluralis telah mengamalkan prinsip hidup rukun.

Kebebasan dan toleransi harus dimaknai secara penuh oleh warga masyarakat antar pemeluk agama di Jawa Barat. Untuk itu, moderasi Islam di Jawa Barat tidak

dimaknai sebagai paradigma untuk “menjinakkan atau menekan” interaksi sosial antar pemeluk agama, tetapi sebagai penguatan “kesalehan sosial” antar pemeluk agama itu sendiri. Dalam memahami dan mengaktualisasikan moderasi Islam, tidak ada peran dominan dari pemeluk agama mayoritas untuk menindas atau menjinakkan minoritas. Dan atas nama demokrasi, agama minoritas berusaha menindas atau menjinakkan mayoritas dengan “jargon” kebebasan tanpa mempertimbangkan kearifan lokal. Dengan demikian, sikap toleran merupakan bentuk “kesalehan sosial” antarumat beragama untuk menciptakan kerukunan yang sejalan dengan Pancasila.

### **Konstruksi Meoderasi Islam di Jawa Barat**

Jawa Barat memiliki tantangan yang besar terkait konflik-konflik yang bermuatan SARA dan membutuhkan upaya solutif agar warga masyarakat dapat hidup aman dan damai. Hal ini sudah menjadi komitmen seluruh komponen masyarakat Jawa Barat, khususnya tokoh agama Islam. Dalam menyebarkan nilai-nilai Islam di tengah kondisi sosial budaya masyarakat Jawa Barat, tokoh-tokoh Islam berpedoman pada tuntunan al-Qur’an dan Hadits dengan menerapkan konsep *tawassuth* atau sering diistilahkan dengan moderat, sehingga gerakannya disebut *wasathiyah*. Hal ini sesuai dengan firman Allah SWT dalam surat Al-Baqarah [2] ayat 143 berikut ini: *“Dan demikian (pula) Kami telah menjadikan kamu (umat Islam), umat yang adil dan pilihan agar kamu menjadi saksi atas (perbuatan) manusia dan agar Rasul (Muhammad) menjadi saksi atas (perbuatan) kamu. dan Kami tidak menetapkan kiblat yang menjadi kiblatmu (sekarang) melainkan agar Kami mengetahui (supaya nyata) siapa yang mengikuti Rasul dan siapa yang membelot. dan sungguh (pemindahan kiblat) itu terasa Amat berat, kecuali bagi orang-orang yang telah diberi petunjuk oleh Allah; dan Allah tidak akan menyia-nyiakan imanmu. Sesungguhnya Allah Maha Pengasih lagi Maha Penyayang kepada manusia”* (QS. Al-Baqarah [2]:143).

Ayat di atas menjelaskan bahwa jelas firman Allah SWT menyatakan karakter Islam diungkapkan dengan kata وَسَطًا, artinya pertengahan atau moderat dalam bertindak di semua aspek kehidupan, seperti: tindakan, pikiran, dan ucapan. Untuk itu, penerapan dakwah yang ideal dalam moderasi Islam harus sejalan dengan tuntunan al-Qur’an dan perlu dirumuskan serta dibangun sesuai prinsip nilai dan norma dengan mengutamakan perhatian terhadap kearifan lokal masyarakat, melalui metode yang ramah, santun dan menghindari perilaku kekerasan, namun juga menerapkan ketegasan dan tidak bertentangan dengan ajaran Islam (Dahlan, 2016:314).

Istilah *wasathan* pada surat Al-Baqarah [2] ayat 143 digunakan dalam beberapa istilah, seperti "moderasi dalam Islam", "Islam moderat" dan juga "Islam wasathiyah". Selanjutnya, istilah tersebut digunakan sebagai terminologi untuk studi yang membahas jalan tengah dalam Islam berdasarkan proyeksi Al-Qur'an tentang identitas diri dan pandangan dunia komunitas Muslim untuk menghasilkan kebajikan yang membantu menciptakan harmonisasi dan keseimbangan sosial dalam kehidupan, baik kehidupan individu, keluarga, masyarakat maupun hubungan antar manusia.

Pluralitas agama di Jawa Barat merupakan fenomena sosial yang unik. Oleh karena itu, moderasi Islam perlu dirumuskan oleh berbagai kalangan sebagai

tantangan yang harus dihadapi dan dilakukan upaya untuk mencari rumusan penyelesaian yang baik dan benar. Hal ini karena Jawa Barat saat ini secara politik ekonomi menjadi salah satu perhatian dunia internasional sebagai pusat rujukan masyarakat yang majemuk. Landasan masyarakat yang berjiwa Bhineka Tunggal Ika merupakan semboyan yang sebenarnya perlu dihayati untuk menciptakan interaksi sosial dalam bentuk asosiatif, yaitu semangat gotong royong dan tolong menolong sesama umat beragama.

Konsep interaksi sosial menjadi bagian penting sebagai katalisator penguatan moderasi beragama, khususnya di Jawa Barat, karena interaksi sosial merupakan sikap utama umat Islam dalam memperkuat kebijakannya membangun masyarakat madani. Peran pesantren juga sangat penting dalam menyiarkan moderasi Islam, karena pesantren sebagai lembaga pendidikan yang memiliki akar dan dikenal luas oleh masyarakat Indonesia (Darlis, 2016). Konsep moderasi Islam yang dilakukan Muhammadiyah dan NU merupakan aktualisasi kiprahnya dalam mewarnai dunia pemikiran Islam sebagai bentuk membendung munculnya paham Islam radikal dalam menjalankan nilai-nilai Islam.

Dalam konteks gerakan Islam di Indonesia, kelompok Islam moderat merujuk pada kelompok Islam yang mengambil posisi tengah di antara dua gerakan Islam radikalisme-fundamentalisme dan sekular-liberalisme. Gerakan yang dimaksud adalah Nahdlotul Ulama (NU) yang dalam interaksi sosial budayanya bersifat *tawassut* (moderat), *tasammuh* (toleran), dan *tawazun* (harmoni). Namun, sebagai produk ijtihad yang belum memberikan petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis sehingga penerapan konsep moderasi Islam dalam kehidupan sehari-hari sering menemui kendala. Bahkan bagi guru, aktualisasi konsep moderasi Islam dalam dunia pendidikan seringkali menghadapi kendala, yaitu ketika konsep tersebut harus diajarkan kepada peserta didik, karena tidak ada rumusan standar konsep pendidikan tentang bagaimana moderasi Islam harus diajarkan kepada peserta didik. Dalam konteks ini, perlu dirumuskan suatu konsep pendidikan yang dapat diimplementasikan secara praktis di lapangan agar relevansi moderasi Islam dalam kehidupan sehari-hari di masyarakat dapat dimaksimalkan, sehingga Islam benar-benar dapat menjadi agama yang membawa rahmat bagi seluruh umat manusia. Ketiadaan rumusan yang dimaksud merupakan masalah yang perlu segera dijawab melalui serangkaian kegiatan penelitian dan pengkajian. Namun, jawaban atas pertanyaan ini harus datang dari orang atau badan tertentu yang memiliki otoritas di bidang Islam dan ilmu pendidikan, seperti dari seorang Kyai yang merupakan ulama yang mewarisi risalah kenabian (*warosatu al-anbiya'*).

Awwaliyah (2019:58) menjelaskan bahwa hasil penelitiannya di lapangan membuktikan bahwa ajaran moderasi Islam dalam pendidikan pesantren mampu menampilkan jati dirinya sebagai poros sentral dalam gerakan Islam moderat antara dua kubu yang berbeda arah, yaitu gerakan Islam kontemporer yang cenderung liberal dan gerakan Islam konservatif radikal. Beberapa agenda utama pengembangan ajaran ini adalah: (1) meningkatkan citra Islam sebagai rahmat bagi alam semesta yang dipandang negatif di dunia internasional; (2) membangun keseimbangan (harmoni) dan membangun kerukunan (toleransi) antar kelompok yang berbeda, baik di luar Islam maupun di dalam Islam itu sendiri; (3) memastikan bahwa pengertian moderasi

tidak melampaui garis-garis utama (*tsawabit*) yang terkandung dalam ajaran Islam; dan (4) menyebarkan perdamaian di muka bumi dengan membangun dialog intra-religious dan inter-faith. Alasan agenda utama tersebut adalah bahwa perbedaan agama adalah entitas yang harus dilindungi dan dihormati sesuai dengan prinsip 'menerima orang lain' (*qabul al-akhar*).

Hilmy (2013:28) menyebutkan bahwa moderasi Islam dalam konteks Indonesia setidaknya memiliki 5 (lima) ciri, yaitu: 1) ideologi non-kekerasan dalam menyebarkan Islam; 2) menganut cara hidup modern dengan segala turunannya, termasuk ilmu pengetahuan dan teknologi, demokrasi, hak asasi manusia dan sejenisnya; 3) penggunaan pemikiran rasional; 4) pendekatan kontekstual dalam memahami Islam, dan; 5) penggunaan ijtihad (latihan intelektual untuk membuat pendapat hukum dengan tidak adanya pembenaran eksplisit dari Al-Qur'an dan Hadh). Namun ciri-ciri tersebut dapat diperluas menjadi beberapa ciri lagi seperti toleransi, kerukunan dan kerjasama antar pemeluk agama yang berbeda.

Penjelasan di atas menunjukkan bahwa moderasi Islam merupakan sikap anti kekerasan dalam menyiarkan ajaran Islam, sebagaimana dicontohkan oleh Nabi Muhammad SAW, serta peran syiar Walisongo yang hingga saat ini dilakukan oleh para pemuka NU. Islam menjamin kemandirian setiap individu untuk menjalani kehidupannya, baik Muslim maupun non-Muslim dengan mengedepankan toleransi antar sesama. Jika ada perbedaan pendapat dan pandangan, maka perlu disikapi dengan bijak. Keberagaman hanya bisa disikapi dengan kebesaran jiwa dan dialog terbuka antar sesama. Sebagai bangsa yang majemuk, Indonesia khususnya Jawa Barat akan selalu diuji dengan berbagai persoalan kerukunan umat beragama. Untuk itu, moderasi Islam bukan sekedar memberikan kebebasan bagi seluruh pemeluk agama untuk melakukan tindakan sosial sesuai kehendaknya, tanpa mempertimbangkan nilai-nilai sosial yang melekat di masyarakat. Pada akhirnya, toleransi hanya dilihat sebagai "obat mujarab" untuk mengatasi masalah sosial yang ditimbulkan oleh kebebasan tanpa batas.

Nahdlatul Ulama memiliki sejarah panjang dalam membangun moderasi Islam. Jika melihat kelahirannya, menunjukkan bahwa NU lahir karena menguatnya gerakan Wahabi radikal dalam membasmi tradisi dan situs peninggalan Nabi di Jazirah Arab, kemudian menyikapi gerakan dan perkembangan organisasi nasional dan keagamaan di Nusantara. Dua alasan inilah yang menjadikan NU sebagai organisasi penyeimbang antara satu kelompok dengan kelompok lainnya. Dalam konteks saat ini, NU masih dalam posisi yang sama sebagai organisasi moderat.

Di tengah arus globalisasi, dengan menguatnya arus informasi dari Barat dan negara-negara Islam lainnya, NU memposisikan Indonesia sebagai negara yang terkena dampak globalisasi. Setidaknya globalisasi dari Barat telah membawa perubahan pada sikap liberalisme, yang mendorong seseorang untuk berpikir dan bertindak secara bebas dalam segala aspek kehidupan. Di sisi lain, penguatan gerakan Islam yang cenderung memunculkan pemikiran dan gerakan radikal. Dalam kondisi ini, NU mengambil peran mediasi dalam aliran pemikiran dan gerakan dengan mengadopsi konsep Islam Nusantara (A J Fuad, 2020).

Islam Nusantara merupakan Islam yang lahir dan tumbuh dalam balutan tradisi dan budaya Indonesia, Islam yang damai, ramah dan toleran. Abdurrahman

Wahid (Gusdur) dengan gagasannya “Pribumisasi Islam” menggambarkan Islam Nusantara sebagai ajaran normatif yang berasal dari Tuhan, kemudian diakulturasikan ke dalam kebudayaan yang berasal dari manusia tanpa kehilangan identitasnya masing-masing. Islam Nusantara berdiri di antara dua paham yang bersebrangan, yaitu liberalisme dan fundamentalisme (Rahmat, 2003:20).

Sejalan dengan fitrah ajaran Islam yang universal dan seimbang, pengembangan *al-wasathiyah* berikut ini dikemukakan oleh Muchlis M. Hanafi dalam Zamimah (2018:81), sebagai metode berpikir, berinteraksi, dan berperilaku berdasarkan sikap *tawazun* (seimbang) dalam menyikapi dua keadaan perilaku yang memungkinkan untuk dibandingkan dan dianalisis, sehingga dapat ditemukan sikap-sikap yang sesuai dengan kondisi dan tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip ajaran agama dan tradisi masyarakat.

Yusuf Qardhawi dalam Zamimah (2018:82), menjelaskan bahwa di antara ciri-ciri ajaran Islam adalah *alwashatiyyah* (moderat) atau *tawazun* (seimban), yaitu keseimbangan antara dua jalan atau dua arah yang saling berhadapan atau saling bertolak belakang. Contoh dua arah yang berlawanan, seperti spiritualisme dengan materialisme, individu dengan kolektif, kontekstual dengan idealisme, dan konsisten dengan perubahan. Asas keseimbangan sejalan dengan kodrat penciptaan manusia dan alam yang serasi dan serasi. Sebagaimana diungkapkan dalam Al-Qur’an: “Dan Allah telah meninggikan langit dan Dia telah meletakkan mizan (keadilan), supaya kamu tidak melampaui batas tentang mizan itu” (QS. Ar-Rahman [55]:7-8).

Berdasarkan penjelasan di atas, penulis menyimpulkan bahwa konstruksi moderasi Islam itu sangat penting dilakukan di mana pun, khususnya di Jawa Barat dengan tujuan untuk membendung arus informasi global yang mengancam dan terjadinya potensi konflik. Konstruksi moderasi Islam ini dapat dilakukan dengan menawarkan konsep *al-wasathiyah* yang digagas KH. Abdurrahman Wahid (Gusdur) dengan bingkai Islam Nusantara.

### **Aktualisasi Moderasi Islam di Jawa Barat**

Islam di Jawa Barat adalah Islam yang ramah dan santun, yang selalu hidup bersama dalam masyarakat, saling membantu, dan menghargai perbedaan (toleransi), serta menghormati Kyai dan Ulama, yang tercermin dalam sosok santri di pondok pesantren. Itulah beberapa bukti nyata bahwa Islam di Jawa Barat adalah Islam yang damai, bersahabat dan santun, atau dengan kata lain Islam moderat.

Moderasi Islam lahir sebagai solusi anti mainstream terhadap Islam yang belakangan ini semakin mengkhawatirkan dan membahayakan akidah umat Islam, khususnya di Jawa Barat. Nahdlatul Ulama dengan Pondok Pesantren dan basis Ulama menjadi benteng yang kuat untuk menangkal paham sesat dan radikalisme. Moderasi Islam menjadi wacana penting saat ini, mengingat maraknya konflik-konflik yang terjadi di kalangan umat Islam. Masalah yang dihadapi umat Islam di Jawa Barat saat ini sangat kompleks, mulai dari masalah sosial, budaya dan agama. Masalah sosial yang dihadapi umat Islam adalah kurangnya kesadaran hidup toleran. Umat Islam saat ini cenderung tidak mempedulikan keberadaan orang lain, seolah-olah tidak membutuhkannya. Sementara itu, budaya merupakan bagian dari masalah yang dihadapi umat Islam saat ini. Budaya Islam sudah tidak menarik lagi bagi umat Islam,



khususnya kaum muda. Mereka lebih menyukai budaya Barat, yang notabene memiliki paham liberal. Pemahaman ini tentu akan membahayakan generasi umat Islam di masa depan.

Kedua masalah umat di atas, pada akhirnya akan melahirkan masalah yang lebih besar, yaitu masalah agama. Masalah internal agama pada umat Islam sebenarnya sudah ada sejak lama, yakni sejak munculnya aliran kalam. Masalah agama kemudian berkembang hingga saat ini, inti permasalahannya adalah perbedaan pemahaman nash Al-Qur'an dan Hadits yang pada akhirnya melahirkan dua kelompok yang berlawanan, kelompok pertama yang memahami Al-Qur'an dan Hadits secara tekstual dengan pemahaman yang sempit, yaitu kelompok fundamentalis. Kedua kelompok ini memahami Al-Qur'an dan Hadits secara bebas, sehingga bisa sesuai dengan perkembangan zaman. Kelompok ini disebut kelompok liberal (Syihab, 1998:36).

Pemahaman fundamentalis akan melahirkan tindakan radikal, sedangkan pemahaman liberal akan melahirkan tindakan yang bebas dan keluar dari norma hukum yang berlaku. Kedua pemahaman ini menjadikan moderasi Islam penting untuk dipelajari, dan selanjutnya diterapkan dalam kehidupan sosial, budaya dan keagamaan. Moderasi Islam dalam bidang sosial ditunjukkan dengan sikap ramah, sopan dan toleran terhadap orang lain. Moderasi Islam dalam bidang kebudayaan ditunjukkan dengan sikap menghargai dan tidak merusak kebudayaan. Kemudian dalam bidang agama, moderasi Islam dapat ditunjukkan dengan tindakan non-radikal dan liberal.

Moderasi Islam merupakan salah satu ciri Islam yang tidak dimiliki oleh agama-agama lain. Moderasi Islam menyerukan dakwah Islam yang toleran, melawan segala bentuk pemikiran liberal dan radikal. Liberal dalam arti memahami Islam dengan standar nafsu dan logika murni yang cenderung mencari pembenaran yang tidak ilmiah, radikal dalam arti menafsirkan Islam secara tekstual dan menghilangkan keluwesan ajarannya, sehingga terkesan kaku dan tidak mampu membaca realitas kehidupan (Nur, 2015:209).

Dalam konteks Indonesia, lahir istilah "Islam Nusantara" yang merupakan bentuk moderasi Islam di Indonesia, yaitu Islam yang damai, bersahabat, dan santun. Islam yang menjunjung tinggi tradisi dan budaya, namun tegas dalam menegakkan syariat. Islam Nusantara merupakan perwujudan Islam *rahmatan lil alamin*, yaitu Islam yang membawa kedamaian dan kebahagiaan bagi seluruh umat manusia di dunia. Perwujudan Islam Nusantara sebagai *rahmatan lil alamin* dapat dilihat dari kondisi sosial, budaya, dan agama di Indonesia khususnya Jawa Barat yang rukun dan bersatu. Islam tidak menghapus budaya lokal, tetapi memodifikasinya sesuai ketentuan syariat, Islam tidak melarang agama lain berkembang, tetapi memberikan kebebasan (toleransi).

Islam Nusantara sebagai perwujudan moderasi Islam memberikan nuansa baru Islam di Jawa Barat. Islam Nusantara mampu membangun sebuah keharmonian sosial, budaya, dan agama dalam konteks ke-Indonesia-an. Jika hal seperti ini terus dijaga dan dipelihara, bukan tidak mungkin Islam Nusantara akan menjadi kiblat baru peradaban Islam (Hasan, 2000:140). Islam Nusantara dengan ruh Islamnya yaitu, Nahdlatul Ulama diharapkan mampu membawa Islam menuju kejayaan, membangun

peradaban dan kemanusiaan. Peradaban dalam arti, keilmuan Islam terus berkembang dan maju. Kemanusiaan dalam arti, umat Islam memiliki etika dan moral, karena keilmuan saja tidak cukup kalau tidak dibarengi dengan etika atau moral.

Islam Nusantara sebagai perwujudan moderasi Islam memberikan nuansa baru Islam di Jawa Barat. Islam Nusantara mampu membangun harmoni sosial, budaya, dan agama dalam konteks Indonesia. Jika hal-hal seperti ini terus dipertahankan, bukan tidak mungkin Islam Nusantara akan menjadi kiblat baru peradaban Islam (Hasan, 2000:140). Islam Nusantara dengan spirit keislamannya, yaitu Nahdlatul Ulama diharapkan mampu membawa Islam menuju kejayaan, membangun peradaban dan kemanusiaan. Peradaban dalam arti, keilmuan Islam terus tumbuh dan maju. Kemanusiaan dalam arti, umat Islam memiliki etika dan moral, karena ilmu pengetahuan saja tidak cukup jika tidak dibarengi dengan etika atau akhlak.

Selanjutnya mengenai ciri-ciri moderasi Islam, sebagaimana dikemukakan oleh Tarmizi Taher (Taher et al., 1998) bahwa: Pertama ada hak atas kebebasan yang harus selalu diimbangi dengan kewajiban. Kecerdasan dalam menyeimbangkan hak dan kewajiban akan sangat menentukan terwujudnya keseimbangan dalam Islam. Kedua, adanya keseimbangan antara kehidupan dunia dan akhirat, serta material dan spiritual, sehingga peradaban dan kemajuan yang dicapai umat Islam tidak dibuat-buat dan ajaib, tetapi esensial dan benar-benar sesuai dengan apa yang diharapkan, yaitu mewujudkan kebaikan di dunia dan di akhirat serta dijauhkan dari musibah dan siksa neraka.

Muchlis M. Hanafi (2016) merinci ciri sikap moderat dalam beragama, terutama dalam memahami dan mengamalkan teks-teks keagamaan, setidaknya ada 6 ciri sebagai berikut:

1. Memahami realitas (*fiqh al-waqi'*); Hal ini didasarkan pada kenyataan bahwa dinamika kehidupan manusia selalu berubah dan berkembang tanpa batas, sedangkan teks-teks agama terbatas. Kenyataan ini menuntut para ulama untuk mendalami hukum-hukum Islam guna merespon perkembangan zaman yang begitu cepat.
2. Memahami *fiqh* prioritas (*fiqh alawlawiyyat*); Dalam Islam, perintah dan larangan ditentukan secara bertahap. Misalnya ada perintah yang bersifat wajib, direkomendasikan dan opsional; Demikian juga ada larangan yang haram dan makruh. Jadi mereka yang di bawah tidak bisa mengalahkan mereka yang di atas.
3. Memahami sunnatullah dalam penciptaan; bahwa penciptaan alam semesta ini secara bertahap serta dalam menentukan hukum agama tidak dapat dilakukan sekaligus. Misalnya, langit dan bumi diciptakan oleh Allah SWT dalam enam masa, padahal sangat mungkin Allah SWT menciptakannya dalam sekejap mata. Demikian pula penciptaan manusia, hewan dan tumbuhan dilakukan secara bertahap. Begitu juga dalam penerapan ajaran Islam dalam kehidupan. Misalnya pada tahap pertama ketika periode Mekkah, dakwah Islam menekankan aspek tauhid dan keimanan, kemudian secara bertahap ketentuan syariat turun. Penetapan syariat juga dilakukan secara bertahap, seperti meniadakan larangan minum miras dan judi.
4. Memberikan kemudahan kepada orang lain dalam beragama; memberikan kemudahan adalah metode Al-Qur'an dan metode yang ditetapkan oleh Nabi

- Muhammad SAW dalam berdakwah. Ketika dia mengirim Mu'adz bin Jabal ke Yaman untuk berdakwah, pesannya adalah "*yassiru wala tu'assiru*", mudahkan, jangan mempersulit mereka. Sikap moderat ini bukan berarti mengorbankan teks-teks agama dengan mencari yang paling mudah bagi masyarakat, tetapi dengan menelaah teks-teks tersebut dan memahaminya secara mendalam untuk menemukan kemudahan yang diberikan oleh agama. Nabi Muhammad sendiri ketika dihadapkan pada dua pilihan, beliau selalu mengambil yang termudah dari keduanya. Oleh karena itu, dalam syariat Islam dikenal dengan istilah *rukhsah*, misalnya boleh melakukan tayamum sebagai pengganti wudlu jika tidak mendapatkan air, atau dapat melakukan shalat jama' dan qashar dalam perjalanan.
5. Memahami teks-teks agama secara komprehensif; Hukum Islam akan dipahami dengan baik ketika sumber-sumber ajarannya (Al-Qur'an dan Sunnah) dipahami secara komprehensif (utuh) tidak parsial (potongan), karena ayat-ayat Al-Qur'an dan Hadits Nabi menafsirkan dan menjelaskan. satu sama lain. Oleh karena itu, menurut ahli tafsir Abu Darraj, bahwa Al-Qur'an seperti mata berlian yang dilihat dari sudut manapun akan memancarkan cahaya berkilauan yang sangat mengagumkan bagi setiap orang.
  6. Bersikap terbuka terhadap dunia luar, mempromosikan dialog dan bersikap toleran; Sikap moderat Islam ditunjukkan melalui keterbukaannya terhadap pihak lain yang berbeda pandangan. Sikap ini didasarkan pada kenyataan bahwa perbedaan di antara manusia adalah keniscayaan, termasuk pilihan untuk percaya atau tidak. Jika dengan agama yang berbeda moderasi Islam menuntut keterbukaan, kerjasama dan toleransi, maka tentunya sesama umat Islam yang berbeda pandangan harus lebih saling menghormati dan menghargai. Hal ini jelas telah ditunjukkan oleh para ulama salaf sehingga memperkaya khazanah pemikiran dalam Islam. Namun, bukan berarti Islam itu lunak, melainkan Islam yang tegas, terutama dalam menghadapi kejahatan dan penyimpangan. Oleh karena itu, untuk menjaga toleransi beragama, Perppu tentang Larangan Penyimpangan dan Penodaan Agama harus dipertahankan, karena jika dicabut akan terjadi *tasyabbuh* (percampuran) yang jelas akan mengganggu dan mengancam kerukunan hidup beragama yang telah dibangun kerukunan.

### Upaya Moderasi Islam di Jawa Barat

Secara umum, ajaran Islam dibagi menjadi tiga kategori, yaitu aqidah, syariah, dan akhlak. Aqidah berkaitan dengan keimanan dan ketaqwaan yang tercermin dalam enam rukun iman. Sedangkan syariat berkaitan dengan syariat ibadah yang ketentuan pelaksanaannya telah ditentukan sebagaimana tercermin dalam rukun Islam yang lima. Atau yang berkaitan dengan aspek sosial masyarakat yang disebut muamalah yang pada umumnya telah ditentukan landasannya dalam agama sebagai pedoman, seperti aspek ekonomi, politik, budaya, dan lainnya. Dalam mengajarkan aspek-aspek agama tersebut tentunya harus berdasarkan referensi yang jelas dan diajarkan sesuai dengan karakteristik ajaran Islam yang *rahmatan lil-'alamin*, menjadi rahmat bagi alam semesta sebagai bentuk moderasi Islam. Oleh karena itu, Islam sebagai agama yang sempurna sangat memperhatikan perkembangan dan pendidikan agama.

Ilmu keislaman sangat membutuhkan epistemologi sebagai metode untuk

menggali dan mengetahui sumber ajaran Islam, bagaimana prosesnya, dari mana asalnya, dan apakah ajaran tersebut dapat dipertanggungjawabkan, sehingga ajaran Islam menjadi jelas dan terbukti kebenarannya tanpa adanya keraguan untuk meyakinkannya. Idri (2015:21) menjelaskan bahwa kebenaran ajaran Islam dapat diketahui dengan teori pengetahuan (epistemologi) yang memiliki aspek-aspek sebagai berikut:

1. Aspek etika; Aspek ini mencakup aspek perseptual ilmu yang berkaitan dengan nilai-nilai moral atau keyakinan seseorang atau sekelompok orang terhadap ajaran Islam untuk mencapai kebahagiaan hidup di dunia dan akhirat. Aspek etika memberikan penjelasan bahwa Islam Nusantara merupakan ilmu yang lahir dari unsur-unsur nilai atau akhlak Islam yang berkembang dalam masyarakat. Akhlak Islam bersumber dari tauhid dan pengakuan Nabi Muhammad SAW sebagai Rasul, sebagaimana tertuang dalam kalimat syahadat. (Maarif, 2015:276).
2. Aspek sejarah; Aspek yang berkaitan dengan berbagai sikap atau cara berpikir manusia yang mempengaruhi dan menentukan persepsinya tentang kebenaran dan kenyataan. Masuknya Islam ke Indonesia tidak mengubah budaya lokal, tetapi memodifikasinya sedemikian rupa sehingga menjadi budaya yang lebih Islami dan bermoral. Para penyebar Islam di Indonesia secara tidak langsung menggunakan tiga cara ini dalam menyebarkan Islam di Indonesia, yaitu mengadopsi budaya dan tradisi Indonesia yang tidak bertentangan dengan ruh Islam (*tahmil*), menghilangkan budaya yang tidak sesuai dengan ruh Islam (*tahrim*), dan merekonstruksi budaya dan tradisi, seperti sesaji, percaya pada kekuatan gaib menjadi simbol yang memiliki makna untuk mengejar Tuhan (*tagyir*).
3. Aspek observasi; Aspek ini menekankan penelitian sebagai sarana untuk mencari pengetahuan sehingga akan tercipta suatu kebenaran yang tentunya berdasarkan fakta dan data yang diperoleh dari hasil penelitian. Di sinilah pentingnya pendidikan penguatan pemikiran moderasi Islam di lingkungan lembaga pendidikan agama dan keagamaan (Pesantren), sehingga substansi ajaran Islam yang damai, santun, dan harmonis benar-benar dapat diwujudkan dalam kehidupan. Pesantren merupakan lembaga studi Islam yang punya nilai historis terhadap gerakan sosial keagamaan. Lembaga ini merupakan lembaga pendidikan Islam tertua di Indonesia. Maka wajarlah apabila banyak kalangan yang menyebutnya sebagai “Bapak” pendidikan Islam di negara yang mayoritas penduduknya umat Islam ini.

Pesantren lahir karena tuntutan dan kebutuhan masyarakat, karena pada zaman dahulu belum ada lembaga pendidikan formal yang mengajarkan pendidikan agama. Pada dasarnya pesantren bukan hanya sekedar lembaga pendidikan. Pesantren juga merupakan media budaya dalam kehidupan masyarakat. Namun seperti yang diungkapkan oleh KH. Abdurrahman Wahid, sangat sedikit orang yang memiliki pandangan seperti itu. Pesantren tidak hanya sebagai lembaga pendidikan intelektual, tetapi juga pendidikan spiritual, pendidikan akhlak, dan sebagai lembaga pendidikan sosial kemasyarakatan. Sebagai lembaga pendidikan dan media budaya masyarakat, pondok pesantren dapat berperan aktif dalam kehidupan sosial masyarakat.

Lembaga pendidikan berbentuk pondok pesantren sangat kental diwarnai dengan nilai-nilai kehidupan yang mengutamakan masalah keseimbangan,

keseerasian, kesetaraan sosial, salah satunya adalah Pondok Pesantren Cipasung Singaparna Kabupaten Tasikmalaya. Sosok Kyai menjadi faktor yang sangat efektif jika muncul situasi konflik akibat perbedaan keyakinan agama dan kepentingan politik. Pondok Pesantren Cipasung merupakan salah satu pondok pesantren yang berpengaruh di Tasikmalaya, Jawa Barat bahkan Nasional. Kehebatan pesantren ini bisa kita lihat dari jumlah santri dan kualitas santri yang dihasilkan oleh Pondok Pesantren Cipasung. Jumlah santri yang mencapai ribuan orang ini ditambah dengan kualitas santri yang “berkualitas” baik yang berkecimpung dalam dunia bisnis, sosial, budaya dan politik. Daya tarik utama pesantren ini adalah karakter pendiri dan penerus pesantren dari KH. Ruhiat, KH. Ilyas Ruhiat hingga KH. Abun Bunyamin Ruhiat. Dari segi pemikiran, pesantren Cipasung menganut pemikiran Ahlussunah wal Jamah (ASWAJA) yang digagas oleh Abu Hasan Asy'ariah. Selain itu, induk organisasi yang diikuti adalah Nahdathul Ulama (NU).

Kajian di Pondok Pesantren Cipasung tidak hanya berkisar pada isu-isu dasar agama, tetapi juga mencakup berbagai isu kontemporer. Mulai dari masalah bisnis, ekonomi, budaya, sosial, bahkan di bidang politik. Ajengan Ruhiat selaku pendiri Pondok Pesantren, sengaja merancang Pondok Pesantren Cipasung menjadi lembaga pendidikan yang memadukan pengajaran umum dan pengajaran agama, sehingga di masa depan baik pengetahuan (umum dan agama) dapat dikembangkan secara seimbang. dan berjalan paralel di Pesantren. Pemikiran ini juga menunjukkan bahwa Ajengan Ruhiat memiliki pandangan dan sikap terbuka terhadap ide-ide baru yang datang dari luar, dan berusaha untuk mengadaptasikannya ke dalam pesantren sejauh dapat memberikan manfaat dan mendukung perkembangan pesantren. (Gunawan & Satori, 2014). Dengan demikian, Pesantren Cipasung merupakan salah satu contoh lembaga pendidikan (Pesantren) di Jawa Barat yang selalu melaksanakan moderasi Islam dengan konsep *tawasuth* dalam menghadapi berbagai persoalan.

Pemikiran progresif Ajengan Ruhiat hanyalah salah satu contoh yang ditemukan di tubuh NU yang masih konsisten memilih jalur pendidikan pesantren. Ciri dan karakter pemikiran Ajengan Ruhiat sama dengan konsep pemikiran NU yang dirumuskan dalam lima cara, yaitu:

- a. Pola pikir moderat (*fikrah tawashshutiyyah*), yang berarti selalu seimbang (*tawazun*) dan moderat (*itidal*) dalam menghadapi berbagai masalah. NU bukanlah ekstrim kanan atau ekstrim kiri.
- b. Pola pikir toleran (*fikrah tasamuiyyah*), artinya NU dapat hidup berdampingan secara damai dengan pihak lain meskipun berbeda keyakinan, cara berpikir dan budaya.
- c. Pola pikir reformatif (*fikrah ishlahiyyah*), artinya NU selalu mengupayakan perbaikan ke arah yang lebih baik (*al-ishlah ila ma huwa al-ashlah*).
- d. Pola pikir dinamis (*fikrah tathawwuriyyah*), NU selalu melakukan kontekstualisasi dalam menjawab berbagai persoalan.
- e. Pola pikir metodologis (*fikrah manhajiyyah*), NU menggunakan kerangka berpikir yang mengacu pada manhaj yang telah ditetapkan NU.

Hal tersebut di atas menunjukkan konsistensi Ajengan Ruhiat memilih jalur pendidikan Pesantren sebagai pengabdianya, bahkan sebagai tarekat-nya:

“*Tarekat Cipasung adalah mengajar santri*”. Ajengan Ruhiat senantiasa meneguhkan komitmen keumatan, bukan komitmen merebut kekuasaan. Dalam pesannya kepada santrinya, misalnya, ia berpesan, “Kudu ngabujuran santri (harus membelakngi santri)”, artinya seorang Kyai harus menjadi imam bagi para santrinya, sabar membina santri, dan tidak sekali-kali meninggalkan Pesantren

Hal di atas menunjukkan konsistensi Ajengan Ruhiat dalam memilih jalur pendidikan Pesantren sebagai pengabdianya, bahkan sebagai tarekatnya: “*Tarekat Cipasung adalah mengajar santri*”. Ajengan Ruhiat selalu menegaskan komitmen keumatan, bukan komitmen merebut kekuasaan. Dalam pesannya kepada santrinya, misalnya, beliau berpesan, “Kudu ngabujuran santri”, artinya seorang Kyai harus menjadi imam bagi santrinya, sabar dalam membina santri, dan jangan pernah meninggalkan Pondok Pesantren. (Gunawan & Satori, 2014).

Di Jawa Barat potensi konflik diakibatkan perbedaan pemahaman dan ketidakpuasan politik mengakibatkan tumbuhnya kekerasan dan radikalisme atas nama agama. Oleh karena itu, lembaga-lembaga pendidikan, khususnya Pesantren harus tampil memberikan pemahaman kepada masyarakat melalui moderasi Islam dengan konsep *tawasuth* dalam upaya mendeteksi dini terjadinya konflik. Apabila konflik terjadi, pemerintah sebagai pemangku kebijakan harus duduk bersama para Kyai sebagai pimpinan Pesantren, dan tokoh-tokoh masyarakat untuk mencari solusinya. Adapun langkah-langkah yang harus ditempuh antara lain:

- 1) Dialog dalam berbagai bentuk di tingkat masyarakat, khususnya di kalangan pelaku kekerasan; Dialognya santai, informal, dan akrab, tidak dalam forum seminar yang kaku dan tegang;
- 2) Dialog yang setara antara pemerintah dan masyarakat dimana sebenarnya pemerintah lebih banyak mendengarkan gejolak yang ada (mendengarkan) daripada terus menertibkan;
- 3) Penyelesaian konflik oleh aparat pemerintah dilakukan dengan pendekatan yang lebih humanis, menjunjung tinggi prinsip hukum dan keadilan, serta menghindari 'teror';
- 4) Menyelenggarakan pendidikan multikultural.

Dalam hal ini, penting mengacu pada James E. Banks (2004:4) yang memaparkan lima dimensi pendidikan multikultural, yaitu: a) Integrasi pendidikan dalam kurikulum (*Content Integration*); b) Konstruksi pengetahuan (*Knowledge Construction*); c) Pengurangan Prasangka (*Prejudice Reduction*); d) Pedagogik kesetaraan antar manusia (*Equity Pedagogy*); e) Pemberdayaan Budaya Sekolah (*Empowering School Culture*).

## KESIMPULAN

Radikalisme berbasis agama di Jawa Barat tumbuh dan berkembang karena didukung oleh situasi masyarakat yang mengalami tekanan politik, ketidakadilan sosial, dan adanya jurang yang dalam antara kaya dan miskin. Moderasi Islam hadir sebagai wacana atau paradigma baru untuk memahami Islam yang menjunjung tinggi nilai-nilai *tasamuh*, pluralisme dan *ukhuwah*. Islam *rahmatan lil 'amin* yang mengedepankan persatuan dan kesatuan umat, serta Islam yang membangun peradaban dan kemanusiaan dalam bingkai Islam Nusantara. Konstruksi, aktualisasi

dan upaya moderasi Islam di Jawa Barat dilakukan oleh lembaga pendidikan agama dan keagamaan terutama Pesantren dengan mengedepankan karakter *fikrah tawashshutiyyah*, *fikrah tasamuhiyyah*, *fikrah ishlahiyyah*, *fikrah tathawwuriyyah*, dan *fikrah manhajiyyah*.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abdurrahman, S. (1999). *Metode Penelitian Suatu Pemikiran dan Penerapan*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Awwaliyah, N. M. (2019). Pondok Pesantren Sebagai Wadah Moderasi Islam Di Era Generasi Millennial. *Islamic Review: Jurnal Riset Dan Kajian ...* <https://journal.ipmafa.ac.id/index.php/islamicreview/article/view/161>
- Banks, J. A., & Banks, C. A. M. (2004). *Handbook of research on multicultural education*.
- Dahlan, M. (2016). Moderasi Hukum Islam dalam Pemikiran Ahmad Hasyim Muzadi. *AL-IHKAM: Jurnal Hukum & Pranata Sosial*, 11(2), 313–334.
- Darlis, D. (2016). PERAN PESANTREN AS'ADIYAH SENGKANG DALAM MEMBANGUN MODERASI ISLAM DI TANAH BUGIS. *Al-Mishbah: Jurnal Ilmu Dakwah Dan Komunikasi*, 12(1), 111–140.
- Dawing, D. (2017). Mengusung Moderasi Islam di Tengah Masyarakat Multikultural. *Rausyan Fikr: Jurnal Studi Ilmu Ushuluddin Dan Filsafat*, 13(2), 225–255.
- Djelantik, S. (1999). *Teroris internasional: aktor bukan negara dalam hubungan internasional*. Penerbit Pt. Citra Aditya Bakti.
- Fahri, M., & Zainuri, A. (2019). Moderasi Beragama di Indonesia. *Intizar*. <http://jurnal.radenfatah.ac.id/index.php/intizar/article/view/5640>
- Fuad, A J. (2020). Akar Sejarah Moderasi Islam Pada Nahdlatul Ulama. *Tribakti: Jurnal Pemikiran Keislaman*. <http://ejournal.iai-tribakti.ac.id/index.php/tribakti/article/view/991>
- Fuad, A Jauhar. (2015). Penetrasi Neo-Salafisme Dalam Lembar Kerja Siswa Di Madrasah. *Jakarta: Kementerian Agama RI*.
- Fuad, A Jauhar, & Susilo, S. (2019). Mainstreaming Of Islamic Moderation In Higher Education: The Radical Experience Conter. *Proceedings of Annual Conference for Muslim Scholars*, 3(1), 467–483.
- Gunawan, H., & Satori, A. (2014). Budaya Politik Pesantren Cipasung Singaparna Kabupaten Tasikmalaya. *Jurnal Ilmu Politik Dan Pemerintahan*. <http://jurnal.unsil.ac.id/index.php/jipp/article/view/GSAS>
- Hanafi, M. M. (2016). Konsep al-Wasathiyyah dalam Islam. *Harmoni*.
- Hasan, M. T. (2000). *Prospek Islam dalam menghadapi tantangan zaman: tulisan-tulisan ini diangkat dari ceramah-ceramah dan makalah dalam berbagai forum*. Lantabora Press.
- Hilmy, M. (2013). Whither indonesia's islamic moderatism? A Reexamination on the Moderate Vision of Muhammadiyah and NU. *Journal of Indonesian Islam*, 7(1), 24–48.
- Idri, H. (2015). *Epistemologi Ilmu Pengetahuan, Ilmu Hadis, dan Ilmu Hukum Islam*. Prenada Media.
- Lexy, J. M. (2002). *Metodologi penelitian kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya.

- Maarif, A. (2015). Islam Nusantara: Studi Epistemologis Dan Kritis. *ANALISIS: Jurnal Studi Keislaman*, 15(2).
- Maghfuroh, U. (2015). *Moderasi Dalam Perspektif Al-Qur'an*.
- Muhajir, N. (2002). Metodologi Penelitian Kualitatif, Edisi IV, Penerbit Rakesarasin, Yogyakarta Muhi, Ali Hanapiah, 2010, Implementasi Nilai-Nilai Good Governance di .... *Qualitative Research in Business & Management* ....
- Nur, A. (2015). Mukhlis. "Konsep Wasathiyah dalam Al-Qur'an." *Jurnal An-Nur*, 4(2).
- Parekh, B. (2001). Rethinking multiculturalism: Cultural diversity and political theory. *Ethnicities*, 1(1), 109–115.
- Rahmat, M. I. (2003). *Islam pribumi: mendialogkan agama, membaca realitas*. Erlangga.
- Sukriy, A. (2004). al-Mukhtashar al-Haamm fi al-Khashaais al-Aammah li al-Islaam. *Dimisyqa: Tp*.
- Sumantri, J. S. (1998). Penelitian Ilmiah, Kefilsafatan dan Keagamaan: Mencari Paradigma Bersama dalam Tradisi Baru Penelitian Agama Islam: Tinjauan antar Disiplin Ilmu. *Nuansa Bekerjasama Dengan Pusjarlit Press, Bandung*.
- Surakhmad, W. (1990). Pengantar Penelitian Ilmiah Dasar Metode Teknik. *Bandung: Transito*.
- Syihab, A. (1998). Akidah Ahlus Sunnah. *Jakarta: Penerbit Bumi Aksara*.
- Taher, T., Azra, A., Burhanuddin, J., & Umam, S. (1998). *Menuju ummatan wasathan, kerukunan beragama di Indonesia*. Pusat Pengkajian Islam dan Masyarakat (PPIM)-IAIN.
- Zamimah, I. (2018). Moderatisme islam dalam konteks keindonesiaan. *Jurnal Al-Fanar*, 1(1), 75–90.



الأفكار : مجلة الدراسات الإسلامية

# al-Afkar

Journal For Islamic Studies

**Vol. 6, No. 1, January 2023**

**al-Afkar, Journal for Islamic Studies is on publishing original empirical research articles and theoretical reviews of Islamic Studies, it covers various issues on the Islamic studies within such number of fields as Islamic Education, Islamic thought, Islamic law, political Islam, and Islamic economics from social and cultural perspectives and content analysis from al-Qur'an and Hadist.**

**ISSN Online : 2614-4905**

ISSN 2614-4905



**[www.al-afkar.com](http://www.al-afkar.com)**

**Fakultas Agama Islam Universitas Wiraloda Indramayu  
STAI DR. HHEZ. Muttaqien Purwakarta,  
Asosiasi Dosen DPK UIN Sunan Gunung Djati Bandung**